



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN ACEH

GEDUNG KEUANGAN NEGARA BANDA ACEH, GEDUNG C LANTAI 2
JL. TGK. CHIK DI TIRO, BANDA ACEH - 23001
TELEPON : (0651) 28220; FAKSIMILE : (0651) 28217, SURAT ELEKTRONIK: kanwildjkn1@kemenkeu.go.id

28 Agustus 2017

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Aceh

SURAT PENGANTAR
NOMOR : SP - 220/WKN.01/2017

No.	Naskah Dinas/Barang	Banyaknya	Keterangan
1.	Salinan KMK Nomor : KEP-110/KM.6/WKN.01/2017 Tanggal 08 Agustus 2017 Tentang Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias Pada Mahkamah Agung RI	1 (satu) set	Disampaikan dengan hormat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.
2.	Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KM.6/WKN.01/2017 tanggal 08 Agustus 2017 tentang Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias		

Diterima tanggal :
Penerima,

Pengirim,
Kepala Bagian Umum
Kantwil DJKN Aceh



Sri Yuwono Hari Sarjito
NIP 19750514 199503 1 001

.....
NIP

Nomor Telepon :
Nomor Faksimile :

Catatan :
Setelah diterima, lembar kedua harap dikirimkan kembali kepada pengirim



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN ACEH**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA BANDA ACEH, GEDUNG C LANTAI 2
JL. TGK. CHIK DI TIRO, BANDA ACEH - 23001
TELEPON : (0651) 28220; FAKSIMILE : (0651) 28217, SURAT ELEKTRONIK: kanwildjkn1@kemenkeu.go.id

28 Agustus 2017

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Aceh

**SURAT PENGANTAR
NOMOR : SP - 220/WKN.01/2017**

No.	Naskah Dinas/Barang	Banyaknya	Keterangan
1.	Salinan KMK Nomor : KEP-110/KM.6/WKN.01/2017 Tanggal 08 Agustus 2017 Tentang Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias Pada Mahkamah Agung RI	1 (satu) set	Disampaikan dengan hormat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.
2.	Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KM.6/WKN.01/2017 tanggal 08 Agustus 2017 tentang Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias		

Diterima tanggal :
Penerima,

Pengirim,
Kepala Bagian Umum
Kanwil DJKN Aceh



Sri Yuwono Hari Sarjito
NIP 19750514 199503 1 001

.....
NIP

Nomor Telepon :
Nomor Faksimile :

Catatan :
Setelah diterima, lembar kedua harap dikirimkan kembali kepada pengirim



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110/KM.6/WKN.01/2017**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA EKS BRR NAD-NIAS
PADA MAHKAMAH AGUNG RI**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara perlu dilakukan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias kepada Mahkamah Agung RI;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Kesenambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam